

**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
**TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-v pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 20 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710707 199101 1 003

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 20 Februari 2024  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
  
**Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710707 199101 1 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	4
D. Landasan Hukum.....	5
E. Sistematika.....	5
BAB II .....	7
PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	14
BAB III .....	18
AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Pengukuran Kinerja .....	18
B. Analisis Capaian Kinerja .....	19
C. Capaian Kinerja Lain.....	31
D. Realisasi Anggaran .....	32
E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	35
BAB IV .....	38
PENUTUP .....	38
Lampiran .....	40
SK Tim SAKIP Perangkat Daerah.....	40
SK Penetapan Dokumen IKU .....	44
PK Kepala PD dan Perubahannya .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantu yang diberikan kepada daerah.

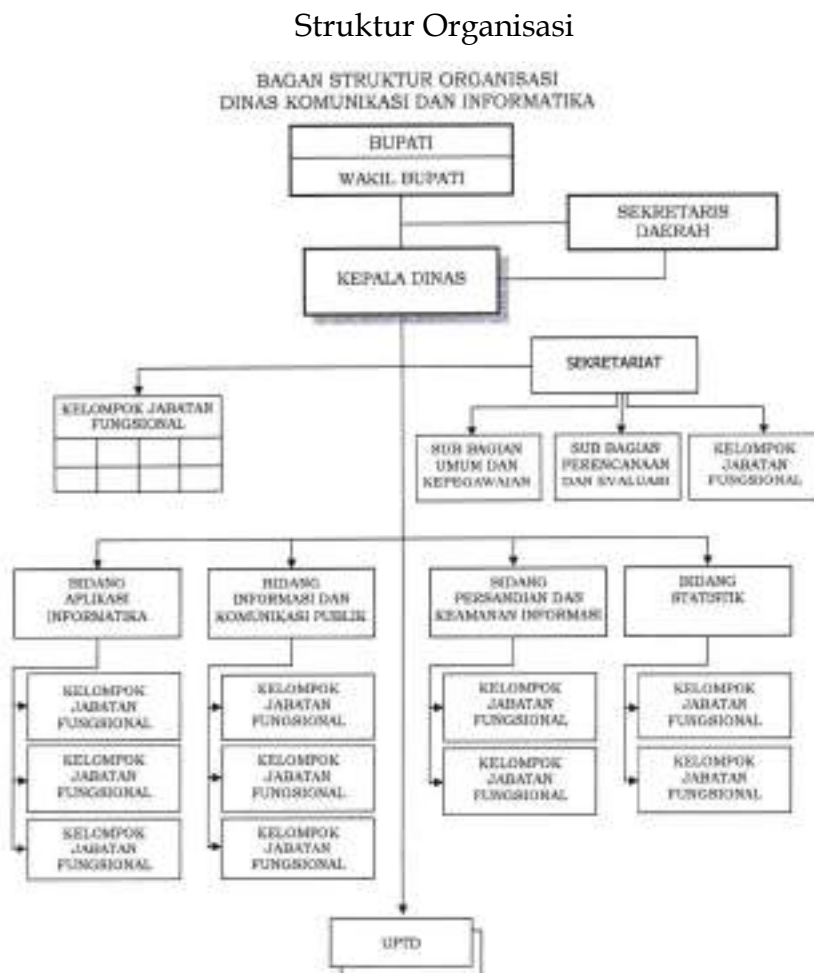
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Komunikasi dan Informatika;

- o Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- o Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis komunikasi dan informatika;
- o Pembinaan dan pemeliharaan pengelolaan pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
- o Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur TIK
2. Integrasi Database dan Layanan e-government
3. Keamanan Informasi
4. Sengketa informasi
5. Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Profesionalisme dan Etos Kerja Pegawai melalui pelaksanaan e-government
3. Penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan teknologi Informatika
4. Pengelolaan Isu Publik melalui monitoring Media
5. Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik / e-Gov
6. Keamanan Informasi



#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 adalah :

BAB I            PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan  
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

2. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan

6. Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Misi ke-xx, yaitu :

## **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		Indeks SPBE	-	-	2,4 < 2,9	2,9 < 3,5	3,5 < 3,9
		1.1	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE					
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	-	-	2 (Terkelola)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	-	-	2 (Terkelola)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	-	-	2 (Terkelola)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	-	-	2 (Interaksi)	3 (Transaksi)	3 (Transaksi)
		1.2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah					
			Nilai SAKIP	-	-	A	A	A

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2018-2023

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN			
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan kematangan Indeks SPBE	1.1	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	<p>Indikator SPBE dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pamekasan guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2020.</p>	$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• <math>BD_i</math> adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• <math>NA_{ij}</math> adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• <math>BA_{ij}</math> adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i.</li> </ul>	Menpan	
		1.2	Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai		$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• <math>BD_i</math> adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• <math>NA_{ij}</math> adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• <math>BA_{ij}</math> adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i.</li> </ul>		Menpan
		1.3	Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai		$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• <math>BD_i</math> adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• <math>NA_{ij}</math> adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• <math>BA_{ij}</math> adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i.</li> </ul>		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		1.4	Tingkat Kematangan Indeks Layanan Domain SPBE	Nilai		$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• <math>BD_i</math> adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• <math>NA_{ij}</math> adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• <math>BA_{ij}</math> adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i.</li> </ul>	Menpan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	Indeks SPBE	Nilai	3,5 < 3,9
			Tingkat Indeks Internal SPBE. Domain Kematangan Kebijakan	Nilai	3
			Tingkat Indeks Kelola SPBE Domain Kematangan Tata	Nilai	3
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3
			Tingkat Indeks SPBE Domain Kematangan Layanan	Nilai	3

*Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan tahun 2023*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Pamekasan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 mengalami 3 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan April dan PAK pada bulan November 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET AWAL	
1	2	3			4	
1.	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	1.1	Tingkat Indeks Internal SPBE.	Domain	Kematangan Kebijakan	3
		1.2	Tingkat Indeks Kelola SPBE	Domain	Kematangan Tata	3
		1.3	Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE			3
		1.4	Tingkat Indeks SPBE	Domain	Kematangan Layanan	3

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023*

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika:

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%	Rp3.814.774.480
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	Rp 95.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD	Rp2.259.038.479
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 Kantor	Rp 57.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	7 Unit	Rp 23.627.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 Jasa	Rp1.291.608.501
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Gedung	Rp 88.000.000
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi	Rp2.578.000.000
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi	3 Terdefinisi	
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Rp2.578.000.000
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika	3 (Terdefinisi) poin	Rp3.355.000.000
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi	3 (Terdefinisi) poin	
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK	3 (Terdefinisi) poin	
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	3 (Terdefinisi) poin	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Rp3.215.000.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	95%	Rp 140.000.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik	3 (Terdefinisi) poin	Rp 259.620.400
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi) poin	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	Rp 259.620.400
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian	3 (Terdefinisi) poin	Rp 55.000.000
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	3 (Terdefinisi) poin	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,1 poin	Rp 55.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 86,4% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
<b>Tujuan</b> : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas				
	Indeks SPBE	3,5	2,89	82,57%
<b>Sasaran 1</b> : Meningkatnya Kematangan Domain SPBE				
1.	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3	2,50	83%
2.	Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3	2,70	90%
3.	Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3	1,45	48%
4.	Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3	3,63	121%
<b>Sasaran 2</b> : Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				
	Nilai SAKIP	A (90)	A (80,60)	A (90%)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

## B. Analisis Capaian Kinerja

<b>Tujuan Strategis</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
---

Capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Indeks SPBE	3,5	2,89	82,57%

Dari perolehan capaian realisasi nilai indikator indeks SPBE pada tahun 2023 diatas, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Belum memiliki Perbup terkait Implementasi Aplikasi Srikandi
2. Belum melakukan review terhadap Perbup No. 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan e-Government
3. Belum melakukan review terhadap Perbup No. 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Tidak ada anggaran untuk penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Peta Rencana SPBE.
5. Belum melakukan implementasi Aplikasi SRIKANDI V.3 ke semua OPD sebagai Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang diciptakan karena sesuai aturan dari Peraturan Presiden No 95. Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik

**Sasaran Strategis 1**  
Meningkatnya Kematangan Domain SPBE

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kematangan Domain SPBE” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3	2,50	83%
1.2 Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3	2,70	90%
1.3 Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3	1,45	48%
1.4 Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3	3,63	121%

Berikut penghitungan dari nilai indikator diatas :

- Domain kebijakan internal SPBE diperoleh dari rata-rata indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-10 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{(1+3+4+2+2+2+2+3+3+3)}{10} = 2,50$$

- Domain Tata Kelola SPBE diperoleh dari rata-rata indikator ke-11 sampai dengan indikator ke-20 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{(2+2+3+3+2+4+3+3+3+2)}{10} = 2,70$$



- Domain Manajemen SPBE diperoleh dari rata-rata indikator ke-21 sampai dengan indikator ke-31 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{(2+2+2+1+1+1+1+2+1+2+1)}{11} = 1,45$$

- Domain Layanan SPBE diperoleh dari rata-rata indikator ke-32 sampai dengan indikator ke-47 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{(4+4+4+4+3+4+3+2+4+4+4+3+4+3+4+4)}{16} = 3,63$$

## 1. Nilai Kematangan Domain SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika

### a. Pelaksanaan indikator :

- Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, capaian 83% dikarenakan beberapa kebijakan belum dilakukan review (misal Perbup SPBE)
- Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE, capaian 90% dikarenakan belum menyusun dokumen Arsitektur SPBE
- Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE, capaian 48% dikarenakan belum menerapkan 11 indikator pada domain tersebut :
  - Penerapan Manajemen Resiko SPBE
  - Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
  - Penerapan Manajemen Data
  - Penerapan Manajemen Aset TIK
  - Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
  - Penerapan Manajemen Pengetahuan
  - Penerapan Manajemen Perubahan
  - Penerapan Manajemen Layanan SPBE
  - Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
  - Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

- Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
- Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE, capaian 121% dikarenakan Diskominfo sudah melaksanakan pelayanan aplikasi terhadap OPD se-Kabupaten Pamekasan. Aplikasi yang dikelola OPD diimplementasikan secara benar dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1.1 Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	1,80	2,50
1.2 Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,60	2,70
1.3 Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	1,00	1,45
1.4 Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	2,87	3,63

c. Realisasi Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir

#### Tahun 2021

Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Pamekasan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Pamekasan, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik, walaupun secara keseluruhan belum terlihat menjadi keunggulan, namun ada beberapa penerapan layanan yang patut diapresiasi. Layanan-layanan tersebut adalah layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan layanan publik SIPALAPA. Kelima layanan tersebut telah berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait sehingga berpotensi meningkatkan keefektifan proses bisnis berjalan.

Penerapan aspek yang dirasakan masih lemah yaitu Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis, TIK, Penyelenggaraan SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK.

Pada Aspek Kebijakan Internal, Pemkab Pamekasan belum memiliki arahan terkait sistem penghubung layanan instansi dan kegiatan audit TIK. Selanjutnya, arahan pengembangan aplikasi yang ada pada Perbup 57/2019 belum memuat keseluruhan siklus pengembangan aplikasi.

Pada Aspek Perencanaan Strategis, belum terdapat peta rencana selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga kegiatan-kegiatan terkait SPBE masih bersifat adhoc berdasarkan kebutuhan sesaat.

Pada Aspek TIK, SOP pengembangan aplikasi yang ada belum secara utuh memuat keseluruhan siklus pengembangan aplikasi. Selain itu, sistem penghubung layanan belum diterapkan. Hal ini berpotensi menghambat proses pengembangan aplikasi secara umum.

Selanjutnya, pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK, Pemkab Pamekasan pada dasarnya sudah melaksanakannya sebagian, namun belum menjadi bagian dari peta rencana SPBE sehingga berpotensi dilakukan secara inkonsisten.

### Tahun 2022

Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Pamekasan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Pamekasan, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik, walaupun secara keseluruhan belum terlihat menjadi keunggulan, namun ada beberapa penerapan layanan yang patut diapresiasi. Layanan-layanan tersebut adalah layanan perencanaan, penganggaran, keuangan,

pengadaan barang dan jasa, dan layanan publik E-SURAT. Kelima layanan tersebut telah berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait sehingga berpotensi meningkatkan keefektifan proses bisnis berjalan.

Penerapan aspek yang dirasakan masih lemah yaitu Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis, TIK, Penyelenggaraan SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK.

Pada Aspek Kebijakan Internal, Pemkab Pamekasan belum memiliki arahan terkait sistem penghubung layanan instansi dan kegiatan audit TIK. Selanjutnya, arahan pengembangan aplikasi yang ada pada Perbup 57/2019 belum memuat keseluruhan siklus pengembangan aplikasi.

Pada Aspek Perencanaan Strategis, belum terdapat peta rencana selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga kegiatan-kegiatan terkait SPBE masih bersifat adhoc berdasarkan kebutuhan sesaat.

Pada Aspek TIK, SOP pengembangan aplikasi yang ada belum secara utuh memuat keseluruhan siklus pengembangan aplikasi. Selain itu, sistem penghubung layanan belum diterapkan. Hal ini berpotensi menghambat proses pengembangan aplikasi secara umum.

Selanjutnya, pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK, Pemkab Pamekasan pada dasarnya sudah melaksanakannya sebagian, namun belum menjadi bagian dari peta rencana SPBE sehingga berpotensi dilakukan secara inkonsisten.

### Tahun 2023

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Adapun dari hasil evaluasi SPB yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sudah dapat menggambarkan predikat bai dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah pada penerapan

Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Administgrasi Berbasis Pemerintah terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, SIMKEUDA, dan kearsipan dinamis melalui Srikandi sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal di Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

d. Analisis Keberhasilan, kegagalan dan solusi

Tujuan keberhasilan capaian Indeks SPBE bisa dilihat pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan internal layanan pusat data menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE.

Secara keseluruhan penerapan Aspek Perencanaan Strategi SPBE yang telah dipenuhi adalah dengan disusunnya Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Masterplan SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

Disamping itu, penerapan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Layanan SPBE dan Audit Aplikasi SPBE mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Begitu juga dengan Aspek Layanan Administrasi SPBE dapat dilihat dengan adanya layanan perencanaan, layanan penyelenggara, layanan pengadaan barang jasa, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan kinerja pegawai menjadi faktor pendorong yang cukup baik.

Adapun program kegiatan penunjang keberhasilan dan kegagalan pada indikator indeks SPBE terdapat pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

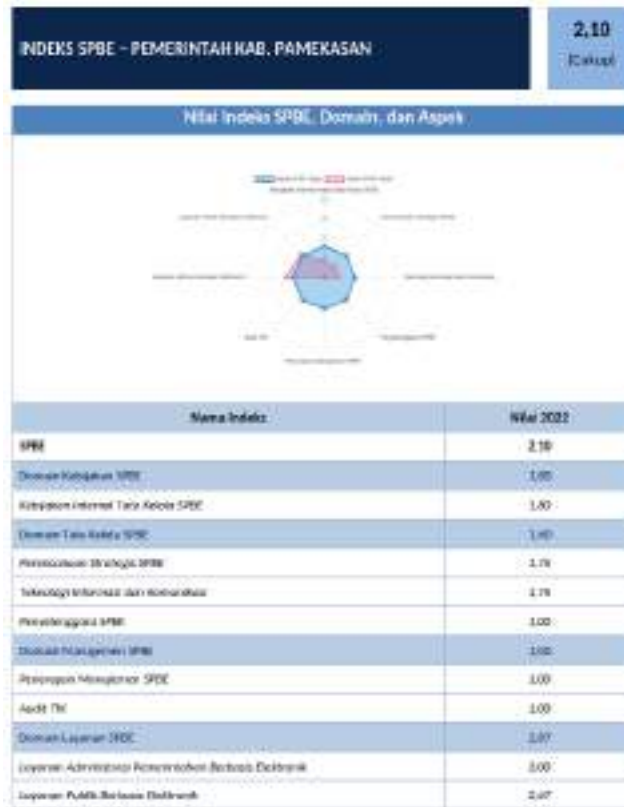
Hal yang paling penting adalah penerapan pada aspek layanan publik SPBE dengan diimplementasikannya pengaduan pelayanan publik, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, layanan publik sektor 1 dan sektor 2.

e. Dokumentasi hasil capaian

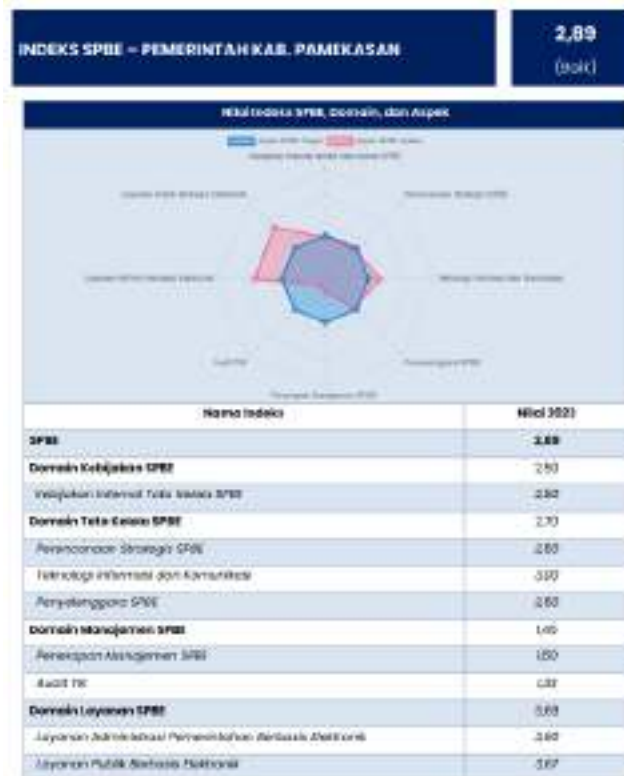
Tahun 2021



Tahun 2022



Tahun 2023



f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jika dilihat dari 4 Domain tersebut, perlu ditingkatkan pada Domain 3 yaitu terkait dengan Manajemen SPBE dimana didalamnya mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan Keamanan Informasi.

Perbandingan nilai realisasi indikator tujuan adalah sebagai berikut:

Indikator	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,12	2,10	2,89

Adapun Perbandingan Nilai Kematangan Domain SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Nilai Kematangan Domain SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 s.d 2023**

Indikator Sasaran	2021	2022	2023
Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,1	1,80	2,50
Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,50	1,60	2,70
Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	1,00	1,00	1,45
Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	2,87	2,87	3,63

Tidak terdapat penurunan terhadap realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan tahun 2021.



**Sasaran Strategis 2**  
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.1 Nilai SAKIP	A (90)	A (80,60)	90%

2. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika

Nilai sistem akuntabilitas kinerja Diskominfo Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **80,60** termasuk dalam kategori penilaian **A** dengan implementasi **Memuaskan**. Hal tersebut ditandai dengan mulai terwujudnya kinerja yang berorientasi hasil, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level pelaksanaan. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel diatas, Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai 80,60 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 82,50 dengan predikat yang sama yaitu A (memuaskan).

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pamekasan memperoleh nilai **80,60** termasuk dalam kategori penilaian "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "Memuaskan". Terdapat beberapa komponen dari penilaian SAKIP tersebut yaitu; Perencanaan Kinerja dengan nilai **24.60**, Pengukuran Kinerja **24,00**, pelaporan kinerja 12,00, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal **20,00**. Pada tiga tahun terakhir Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendapat nilai pada **2021** dengan nilai **82,29**, tahun **2022** dengan nilai **82,50** dan pada tahun **2023** dengan nilai **80,60**. Dalam segi analisis yang dilakukan terkait keberhasilan, kegagalan dan solusi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi AKIP dari tahun-tahun sebelumnya namun masih ada beberapa dokumen yang tidak memiliki legalitas dikarenakan human error.

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 s.d  
2023**

2021	2022	2023
82,29	82,50	80,60

Terdapat penurunan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena :

- i. Faktor menurunnya nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami perubahan indikator dan ada beberapa dokumen yang tidak terdapat legalitas yang sah.
- ii. Rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2022 belum seluruhnya ditindaklanjuti secara berjenjang.
- iii. Penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang kurang memadai.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Infotmatika untuk Nilai SAKIP 2023, diantaranya :

1. Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja antara IKU, Renstra dan Renja.
2. Menindaklanjuti terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Memberikan informasi analisis pencapaian kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan dari pencapaian setiap kinerja, serta upaya perbaikan.
4. Memastikan kembali rencana aksi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan aksi nyata dan monitoring setiap periode.

### C. Capaian Kinerja Lain

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendapatkan penghargaan pada kategori "MENUJU INFORMATIF" tingkat Kabupaten/kota se Jawa Timur oleh KI (Komisi Informasi) dengan nilai **Nilai SAQ 81,75. Nilai Visitasi 97,05. Nilai Wawancara 85 dengan Total Nilai 87,93.**



## D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.814.774.480	Rp 3.665.423.378	96,08%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 95.000.000	Rp 91.735.650	96,56%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 54.231.000	Rp 53.791.750	99,19%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.381.500	95,26%
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.281.500	91,26%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.260.250	90,41%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.386.750	95,47%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 20.769.000	Rp 20.033.000	96,46%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	Rp 8.600.900	86,01%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.259.038.479	Rp 2.126.519.334	94,13%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.259.038.479	Rp 2.126.519.334	94,13%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 57.500.000	Rp 51.180.901	89,01%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.000.000	Rp 1.961.000	98,05%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.000.000	Rp 3.913.500	97,84%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	100,00%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 40.000.000	Rp 39.680.901	99,20%
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100,00%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 23.627.500	Rp 23.242.000	98,37%
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.627.500	Rp 23.242.000	98,37%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.291.608.501	Rp 1.288.632.293	99,77%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 124.508.501	Rp 123.132.293	98,89%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.167.100.000	Rp 1.165.500.000	99,86%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 88.000.000	Rp 84.113.200	95,58%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 50.000.000	Rp 48.036.300	96,07%
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 5.000.000	Rp 4.413.400	88,27%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3.000.000	Rp 2.754.500	91,82%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 28.909.000	96,36%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2.578.000.000	Rp 2.529.780.998	98,13%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.578.000.000,00	Rp 2.529.780.998,00	98,13%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 5.000.000,00	Rp 4.706.000,00	94,12%
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 5.000.000,00	Rp 4.960.000,00	99,20%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 455.000.000,00	Rp 449.536.500,00	98,80%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp 63.000.000,00	Rp 62.415.200,00	99,07%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 2.050.000.000,00	Rp 2.008.163.298,00	97,96%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 3.355.000.000,00	Rp 3.333.781.137,00	99,37%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.215.000.000,00	Rp 3.195.699.550,00	99,40%
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000,00	Rp 14.824.550,00	98,83%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 3.200.000.000,00	Rp 3.180.875.000,00	99,40%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 140.000.000,00	Rp 138.081.587,00	98,63%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	Rp 98.833.250,00	98,83%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 15.000.000,00	Rp 14.786.000,00	98,57%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 15.000.000,00	Rp 14.630.337,00	97,54%
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp 10.000.000,00	Rp 9.832.000,00	98,32%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 259.620.400,00	Rp 243.888.176,00	93,94%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 259.620.400,00	Rp 243.888.176,00	94%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 30.000.000,00	Rp 26.329.777,00	88%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 30.000.000,00	Rp 26.553.929,00	89%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 21.900.000,00	Rp 19.952.000,00	91%
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Rp 14.620.400,00	Rp 13.098.000,00	90%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rp 163.100.000,00	Rp 157.954.470,00	97%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 55.000.000,00	Rp 49.855.750,00	91%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000,00	Rp 49.855.750,00	91%
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	Rp 15.498.400,00	77%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.000.000,00	Rp 34.357.350,00	98%

## E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
1.	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	Indeks SPBE	3,5	2,89	82,57%	Rp 3.200.000.000	Rp 3.180.875.000	99,40%	-16,83%
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	3	2,50	83,33%				-16,07%
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3	2,70	90,00%				-9,40%
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3	1,45	48,33%				-51,07%
			Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3	3,63	121,00%				21,60%

Realisasi anggaran pada tujuan dan sasaran diatas merupakan Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang merupakan sub kegiatan yang mendukung pada tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000 dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.180.875.000 dengan tingkat capainya 99%. Terdapat tingkat efisiensi terendah pada Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE yaitu -51,07% dikarenakan belum menerapkan 11 indikator pada domain tersebut. Sedangkan tingkat efisiensi tertinggi pada Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE

yaitu 21,60% dikarenakan Diskominfo Pamekasan sudah melaksanakan pelayanan aplikasi terhadap OPD se Kabupaten Pamekasan, aplikasi yang diimplementasikan secara benar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	Rp3.814.774.480	Rp3.665.423.378	96,08%	0,039
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Rp 95.000.000	Rp 91.735.650	96,56%	0,034
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 OPD	1 OPD	100%	Rp 2.259.038.479	Rp 2.126.519.334	94,13%	0,059
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 ASN	-	-	-	-	-	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kantor		100%	Rp 57.500.000	Rp 51.180.901	89,01%	0,110
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	4 Unit	57%	Rp 23.627.500	Rp 23.242.000	98,37%	-0,412
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Jasa	10 Jasa	100%	Rp 1.291.608.501	Rp 1.288.632.293	99,77%	0,002
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Gedung	1 Gedung	100%	Rp 88.000.000	Rp 84.113.200	95,58%	0,044
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3 Terdefinisi	1,89 Terdefinisi	63%	Rp 2.578.000.000	Rp 2.529.780.998	98,13%	-0,351
		3 Terdefinisi	3 Terdefinisi	100%				0,019
		3 Terdefinisi	2,67 Terdefinisi	89%				-0,091
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	97.8%	98%	Rp 2.578.000.000	Rp 2.529.780.998	98,13%	-0,003
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3 (Terdefinisi) poin	0,938 (Terdefinisi) poin	31%	Rp 3.355.000.000	Rp 3.333.781.137	99,37%	-0,681



No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
		3 (Terdefinisi) poin	1,75 (Terdefinisi) poin	58%				-0,410
		3 (Terdefinisi) poin	1 (Terdefinisi) poin	33%				-0,660
		3 (Terdefinisi) poin	1 (Terdefinisi) poin	33%				-0,660
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95%	100%	105%	Rp 3.215.000.000	Rp 3.195.699.550	99,40%	0,059
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95%	95%	89%	Rp 140.000.000	Rp 138.081.587	98,63%	-0,092
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	3 (Terdefinisi) poin	3 (Terdefinisi) poin	100%	Rp 259.620.400	Rp 243.888.176	93,94%	0,061
		3 (Terdefinisi) poin	1 (Terdefinisi) poin	33%				-0,606
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Rp 259.620.400	Rp 243.888.176	93,94%	0,061
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3 (Terdefinisi) poin	1 (Terdefinisi) poin	33%	Rp 55.000.000	Rp 49.855.750	90,65%	-0,573
		3 (Terdefinisi) poin	1 (Terdefinisi) poin	33%				-0,573
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,1 poin	0 poin	0%	Rp 55.000.000	Rp 49.855.750	90,65%	-0,906

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang kurang efisien, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya relaksasi anggaran namun pada indikator kinerja tidak mengalami perubahan dimana menyebabkan capaian kinerja dan anggaran program kegiatan tidak efektif dengan tingkat efisiensi yang rata-rata rendah.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil” Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai, dengan rincian :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 82,57% (kategori berhasil)
- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja 1 sebesar 83,33% (kategori berhasil)

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja 2 sebesar 90% (kategori berhasil)
- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja 3 sebesar 48,33% (kategori kurang)
- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja 4 sebesar 121% (kategori berhasil).

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.062.394.880,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.784.927.162,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,24% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 97,24%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 20 Februari 2024  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
  
**Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710707 199101 1 003

## **Lampiran**

### **SK Tim SAKIP Perangkat Daerah**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jokotole IV/1 Telp. (0324) 322868/Fax : (0324) 3510199

Website : [kominfo.pamekasankab.go.id](http://kominfo.pamekasankab.go.id) email : [diskominfo@pamekasankab.go.id](mailto:diskominfo@pamekasankab.go.id)  
PAMEKASAN

---

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR : 188 / 66.1 /432.314/2023

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan serta dalam rangka melaksanakan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;  
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;  
9. Keputusan Menteri PAN & RB Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007;
11. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :
- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya;
  - b. Menanggapi pengaduan Pelayanan dari masyarakat atau badan hukum;
  - c. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik;
  - d. Menyusun dan Menerapkan SOP dan SP;
  - e. Melakukan Pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
  - g. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
  - h. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja;
  - i. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

k. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf l di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pamekasan



**Ir. MOHAMAD, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630206 198903 1 005

## **SK Penetapan Dokumen IKU**





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 68.1 /432.314/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

**Menimbang**

- : 1. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 No.10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018 – 2023;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Menetapkan :**

**Pertama**

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas

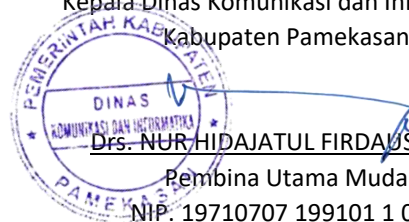
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan  
Tahun 2018-2023.

**Kedua** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator Utama, dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
: 10 Juli 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pamekasan

  
Drs. NUR HIDAJATUL FIRDAUS, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710707 199101 1 003

## **PK Kepala PD dan Perubahannya**



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOHAMAD, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 02 Januari 2023

Pihak Kesatu,

Ir. MOHAMAD, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks SPBE	3,5 < 3,9
	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3 (Transaksi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 Kantor
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	7 Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 Jasa
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Gedung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
10.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
11.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	3 (Terdefinisi) poin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
13.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	95%
14.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi) poin
15.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	3 (Terdefinisi) poin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,1 poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.138.270.790	APBD
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 148.000.000	APBD
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.438.534.789	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 75.500.000	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8.627.500	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.316.608.501	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 111.000.000	APBD
9. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 4.296.649.500	
10. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.296.649.500	APBD

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
11. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 3.585.683.950	APBD
12. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.221.000.000	APBD
13. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 364.683.950	APBD
14. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
15. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 475.020.400	APBD
16. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 475.020.400	APBD
17. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 84.875.000	APBD
	Rp. 84.875.000	APBD

Pihak Kedua,



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 02 Januari 2023

Pihak Kesatu,



Ir. MOHAMAD, MM  
NIP. 19630206 198903 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pamekasan, 11 April 2023

Pihak Kesatu,

SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks SPBE	3,5 < 3,9
	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3 (Transaksi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 Kantor
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	7 Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 Jasa
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Gedung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
10.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
11.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	3 (Terdefinisi) poin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
13.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	95%
14.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi) poin
15.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	3 (Terdefinisi) poin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,1 poin

Program	Anggaran	Keterangan
18. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.944.961.200	APBDP
19. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 95.000.000	APBDP
20. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.389.225.199	
21. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. -	APBDP
22. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 57.500.000	APBDP
23. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8.627.500	APBDP
24. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.316.608.501	APBDP
25. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 78.000.000	APBDP
26. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 2.578.000.000	APBDP
27. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.578.000.000	APBDP

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
28. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 3.355.000.000	APBDP
29. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.215.000.000	APBDP
30. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000	APBDP
31. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 259.620.400	APBDP
32. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.000.000	APBDP
33. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 55.000.000	APBDP
34. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

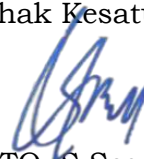
Pamekasan, 11 April 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi



SUPRIYANTO, S.Sos, M.Si NIP.  
19730802 199302 1 001



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Masrukin, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 01 November 2023  
Pihak Kesatu,

Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks SPBE	3,5 < 3,9
	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3 (Transaksi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 Kantor
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	7 Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 Jasa
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Gedung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
10.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
11.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	3 (Terdefinisi) poin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
13.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	95%
14.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi) poin
15.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	3 (Terdefinisi) poin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,1 poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.814.774.480	APBDP
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 95.000.000	APBDP
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.259.038.479	APBDP
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. -	APBDP
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 57.500.000	APBDP
9. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
10. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.627.500	APBDP



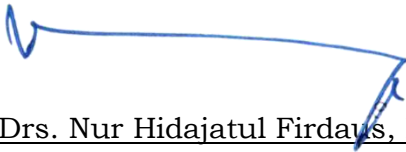
<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
11. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 3.355.000.000	APBDP
12. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.215.000.000	APBDP
13. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000	APBDP
14. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 259.620.400	APBDP
15. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.000.000	APBDP
16. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 55.000.000	APBDP
17. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 01 November 2023

Pihak Kesatu,

  
Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si  
NIP. 19710707 199101 1 003